

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Tatanan internasional banyak mengalami perubahan pasca Perang Dingin, unipolaritas mengalami penurunan yang ditandai dengan bangkitnya negara-negara kecil dan berkembangnya tren multipolaritas. Tiongkok merupakan salah satu negara yang populer dalam fenomena multipolaritas ini. Kebangkitan Tiongkok sebagai kekuatan global ditandai dengan semakin pentingnya keberadaan Tiongkok pada ekonomi dan pembangunan di tingkat global dan regional.<sup>1</sup>

Pada tingkat regional seperti di Asia, Tiongkok mulai menaruh perhatian pada kawasan Asia Selatan. Meskipun kawasan seperti Asia Timur Laut dan Asia Tenggara sebelumnya menjadi prioritas utama dalam kebijakan luar negeri Tiongkok di Asia, kini Tiongkok juga menganggap kawasan Asia Selatan sama pentingnya dalam strategi kebijakan luar negerinya.<sup>2</sup> Tiongkok melakukan strategi ekspansif melalui pembangunan jaringan diplomatik, dan investasi ekonomi untuk membangun kemitraan yang baik di kawasan ini.

Asia Selatan merupakan kawasan yang memiliki potensi besar bagi strategi ekspansi Tiongkok. Letak geografisnya yang memiliki akses ke Samudra Hindia dan Selat Malaka serta rute perdagangan maritim, menjadikan kawasan ini penting bagi perdagangan global. Tiongkok menghadapi sebuah tantangan yang cukup

---

<sup>1</sup> Sheng Ding, "Analyzing Rising Power from the Perspective of Soft Power: A New Look at China's Rise to the Status Quo Power," *Journal of Contemporary China* 19, no. 64 (Maret 2010): 255–272.

<sup>2</sup> Jagannath P. Panda, "Competing Realities in China–India Multilateral Discourse: Asia's Enduring Power Rivalry," *Journal of Contemporary China* 22, no. 82 (Juli 2013): 669–690.

rumit di Asia Selatan, di mana Tiongkok harus berhadapan dengan India yang merupakan hegeomon di kawasan tersebut.<sup>3</sup>

Hubungan Tiongkok dengan India atau Sino-India ditandai dengan dinamika konflik dan kerja sama. Sino-India menjalin kerja sama dalam Brazil, Russia, India, China and South Africa (BRICS), kerja sama yang mewadahi negara anggotanya untuk bersama-sama menentang dominasi barat dalam politik ekonomi global.<sup>4</sup> Keduanya juga menjalin kerja sama keamanan melalui Shanghai Cooperation Organisation (SCO) yang bertujuan untuk mendorong stabilitas regional melalui kerjasama perbatasan antarnegara di kawasan Asia.

Di sisi lain, Tiongkok dan India juga berhadapan dalam sejumlah konflik kepentingan yang sangat kompleks. Konflik ini berakar pada sengketa perbatasan yang sudah terjadi sejak tahun 1960 yang kini menjadi perebutan wilayah di Aksai Chin dan Arunachal Pradesh, yang terus berkembang meskipun sering mengalami penurunan ketegangan. Persaingan Sino-India meliputi konflik perbatasan, perebutan status dominasi historis, masalah ketidak seimbangan kerjasama ekonomi, serta ketegangan geopolitik seperti Tiongkok-Pakistan, dan aliansi India dalam Quadrilateral Security Dialogue (QUAD). Yang mana hal ini dinilai dapat mengganggu pencapaian ambisi Tiongkok di Asia Selatan.

Sifat persaingan ini pada dasarnya asimetris, dimana Tiongkok secara umum tidak terlalu peduli terhadap India, dibandingkan India terhadap Tiongkok. Terutama karena Tiongkok lebih fokus pada tantangan dari Amerika Serikat (AS)

---

<sup>3</sup> Yu Chen, "Main Problems, Opportunities and Countermeasures of China India Cooperation from the Perspective of Geopolitics," *SHS Web of Conferences* 163 (1 Januari, 2023): 04003–04003.

<sup>4</sup> Daniel Azevedo, "An Evolving BRICS and the Shifting World Order," *BCG Global*, diakses pada 19 April, 2024, <https://www.bcg.com/publications/2024/brics-enlargement-and-shifting-world-order>.

dan sekutunya yang dianggap lebih kuat. Akan tetapi sejumlah penelitian terbaru berargumen bahwa meskipun bersifat asimetris, persaingan ini juga bersifat dua arah, dimana Tiongkok juga memandang India sebagai pesaing.<sup>5</sup>

Ambisi hegemonik India di Asia Selatan, baik di darat maupun laut dipandang sebagai tantangan bagi Tiongkok yang tengah mendorong integrasinya dengan Asia Selatan melalui proyek Belt and Road Initiative (BRI).<sup>6</sup> Sehingga jika Tiongkok tidak mengamankan kepentingan di Asia Selatan dan Samudra Hindia, akan sulit bagi Tiongkok untuk mewujudkan aspirasinya sebagai kekuatan global. Selain menghadapi ekspansi India di Asia Selatan, analisis Tiongkok juga mencemaskan strategi *Advance East* India yang dianggap bertujuan menahan pengaruh Tiongkok serta memperkuat hubungan dengan negara-negara Asia-Pasifik.<sup>7</sup>

Dengan demikian, Tiongkok semakin terdorong untuk memaksimalkan upayanya dengan memperkuat hubungan dengan negara-negara di Asia Selatan. Hal itu dilakukan Tiongkok melalui keterlibatan dalam dengan South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC), sebuah organisasi yang didominasi oleh India secara historis, dianggap sebagai langkah strategis untuk dapat melemahkan dominasi India. Tiongkok juga berusaha meningkatkan hubungan diplomatik dengan negara-negara yang mencari mitra alternatif baik untuk menyaingi India maupun untuk mengurangi ketergantungan pada India,

---

<sup>5</sup> Manjeet S. Pardesi, "Explaining the Asymmetry in the Sino-Indian Strategic Rivalry," *Australian Journal of International Affairs* 75, no. 3 (24 Februari 2021): 341–65

<sup>6</sup> Li Li, "Stability in Southern Asia," in *Crux of Asia: China, India, and the Emerging Global Order*, ed. Ashley J. Tellis and Sean Mirski (Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace, 2013), 125–133.

<sup>7</sup> Li Li, "India's Advance East Strategy and Its Indo-Pacific Diplomacy," *Contemporary International Relations* 28, no. 3 (2018): 28–52.

seperti Pakistan, Bangladesh, dan Nepal. Negara-negara tersebut menjadikan Tiongkok sebagai penyeimbang pengaruh dan dominasi India pada aspek tertentu. Dengan demikian, hal ini mencerminkan bahwa negara-negara tersebut telah mengizinkan Tiongkok untuk memasuki Asia Selatan sebagai pesaing dari India.<sup>8</sup>

Tingginya keterlibatan Tiongkok di Asia Selatan semakin memperjelas persaingannya dengan India, termasuk hubungannya dengan Nepal yang semakin mendalam. Keberhasilan Tiongkok meningkatkan pengaruhnya di Nepal, akan dapat memberikan sejumlah dampak signifikan terhadap India. Hal itu dikarenakan Nepal merupakan negara dalam lingkup pengaruh tradisional India.<sup>9</sup> India secara historis banyak membantu pembangunan substantif pada Nepal, keduanya menandatangani *Perjanjian Perdamaian dan Persahabatan* pada tahun 1950 yang membuat Nepal menjadi sangat bergantung pada kebijakan India. Posisi Nepal dinilai sangat penting bagi keamanan wilayah perbatasan India di bagian utara. Namun sejak terjadinya perang Sino-India 1950, Nepal menyadari bahwa penting baginya untuk juga menyeimbangkan hubungan diplomatik dengan Tiongkok.<sup>10</sup> Oleh karenanya Nepal telah menjadi salah satu medan pertempuran dalam rivalitas Sino-India.<sup>11</sup>

Sebelum tahun 2006 keterlibatan bilateral Tiongkok di Nepal terbatas pada hubungan dengan monarki Nepal. Tiongkok mulai berinteraksi dalam spektrum politik yang lebih luas setelah Nepal mengadopsi sistem republik.<sup>12</sup> Tiongkok ingin

---

<sup>8</sup> Bibek Chand, "Dynamics of Rivalry between Geographically Contiguous Regional Powers: The Case of Sino-Indian Competition," *Asian Politics & Policy* 11, no. 1 (January 2019): 122–143.

<sup>9</sup> Shashank Joshi, "China and India: Awkward Ascents," *Orbis* 55, no. 4 (January 2011): 558–576.

<sup>10</sup> Gaurav Raj Dahal, "Nepal's Attempt to Escape Asymmetrical Interdependence with India," *Journal of Political Science* 19 (December 13, 2019): 65–84.

<sup>11</sup> Karisma Regmi, "Nepal's Significance amidst the Tripartite Competition between China, India and the US," *Unity Journal* 4, no. 01 (15 Februari, 2023): 194–207.

<sup>12</sup> Ranjit Rae, *Kathmandu Dilemma* (Penguin Random House India Private Limited, 2021).

menjaga keamanan nasionalnya terkait Tibet Autonomous Region (TAR) dalam hubungannya dengan Nepal dan berusaha mengurangi ketergantungan Nepal pada India dan Barat. Upaya aktif Tiongkok dalam meningkatkan hubungan dengan Nepal dalam beberapa tahun terakhir banyak didorong oleh peningkatan militer India di perbatasan.<sup>13</sup>

Persaingan terlihat dalam berbagai sektor, India memberikan bantuan sebesar INR 100 juta di Mustang, yang segera dibalas Tiongkok dengan INR 10 juta untuk fasilitas pendidikan. Dalam infrastruktur, Tiongkok memperluas jalur kereta ke perbatasan Nepal, sementara India merespons dengan proyek di lima titik perbatasan.<sup>14</sup> Di sektor militer, bantuan "non-lethal" Tiongkok senilai USD 19,8 juta menantang dominasi India. Persaingan juga terjadi di sektor energi, dengan proyek West Seti Tiongkok senilai USD 1,8 miliar yang melemahkan pengaruh India, terutama setelah protes lokal terhadap proyek energi India.<sup>15</sup>

Baik India maupun Tiongkok memiliki kepentingan yang saling bersinggungan terhadap Nepal. Tiongkok dan India sama-sama menginginkan stabilitas Nepal, di mana Tiongkok memandangnya penting untuk memperluas pengaruhnya di kawasan, sementara India menilai stabilitas Nepal krusial bagi stabilitas statusnya dan keamanan perbatasan.<sup>16</sup> Meski demikian, dalam hal ini Nepal tetap mengupayakan sikap netral dan menghindari keberpihakan guna menghindari potensi konflik dan untuk mengamankan kepentingan domestiknya.

---

<sup>13</sup> Anil Sidgel, "China's Growing Footprint in Nepal: Challenges and Opportunities for India," *ORF ISSUE BRIEF* 1, no. 260 (3 Oktober, 2018): 1–12.

<sup>14</sup> Jaiswal, Pramod. *Policy Options for Nepal*. Institute of Peace and Conflict Studies, 2014. diakses pada 17 januari, 2025, JSTOR. <https://www.jstor.org/stable/resrep09164>.

<sup>15</sup> Johannes Dragsbaek Schmidt and Manish Thapa, "The Great Himalayan Game: India and China Rivalry in Nepal,"

<sup>16</sup> Prakash Bista, "Geo-Political Rivalry of Global Powers in Nepal: An Impact Analysis," *Unity Journal* 4, no. 01 (15 Februari, 2023): 1–16.

## 1.2 Rumusan Masalah

Kawasan Asia Selatan memiliki banyak potensi yang dapat mendukung kelancaran strategi ekspansi Tiongkok, akan tetapi India sebagai hegemon di kawasan tersebut tidak menyambut kehadiran Tiongkok dengan baik. Hal ini terjadi karena adanya persaingan di antara kedua negara yang berkepanjangan. Tiongkok berusaha bersaing dengan meningkatkan hubungan bilateral dengan negara-negara lain di Asia Selatan. Salah satu titik fokus dari persaingan tersebut adalah aktivitas Tiongkok yang semakin besar di Nepal. Ini telah menimbulkan kekhawatiran bagi India yang selama ini menganggap Nepal sebagai zona pengaman keamanan untuk mencegah infiltrasi asing terutama dari Tiongkok. Sehingga India mengupayakan berbagai kebijakan untuk tetap mempertahankan posisinya sekaligus mencegah ambisi dominasi Tiongkok di Asia Selatan. Meski demikian, Nepal bukanlah aktor pasif dalam hal ini. Nepal terus menavigasi tindakan penyeimbangan yang kompleks antara dua kekuatan besar ini. Untuk itu perlu melihat bagaimana strategi Tiongkok di Nepal dalam menghadapi dominasi India di Asia Selatan.

## 1.3 Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan dari penelitian ini adalah bagaimana strategi geoekonomi Tiongkok di Nepal dalam memperkuat posisinya di Asia Selatan?

## 1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi geoekonomi Tiongkok yang diterapkan di Nepal sebagai bagian dari upaya memperkuat posisinya di Asia Selatan, dengan menyoroti instrumen geoekonomi yang

digunakan Tiongkok serta bagaimana itu dapat berdampak pada dinamika geopolitik kawasan terkhususnya pada Nepal dan India.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Secara Akademis**

Penelitian ini akan dapat menambahkan pemahaman dan perspektif baru bagi akademisi dan terkhususnya mahasiswa Hubungan Internasional tentang bagaimana strategi yang dilakukan oleh Tiongkok untuk menghadapi persaingan geopolitik dengan India dalam upaya ekspansinya di kawasan Asia Selatan terutama di negara Nepal, serta bagaimana implikasinya terhadap posisi Tiongkok di mata internasional.

### **1.5.2 Secara Praktis**

Penelitian ini akan dapat menjadi pertimbangan bagi para pengambil kebijakan Indonesia untuk merumuskan kebijakan luar negeri atau strategi untuk memanfaatkan alat ekonomi dalam kepentingan geopolitik.

## **1.6 Tinjauan Pustaka**

Peneliti merujuk pada literatur bacaan ilmiah yang dinilai relevan dan layak untuk menyusun dan menganalisis penelitian ini. Terdapat lima karya tulis yang peneliti jadikan sebagai tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang pertama yaitu *The India-China Bilateral Relationship: A 'Serious and Enduring Rivalry'* yang ditulis oleh Alan Bloomfield. Artikel jurnal ini memberikan penjelasan mengenai hubungan Sino-India dari sudut pandang dan hasil analisis para ahli. Sejumlah ahli melihat hubungan ini dengan optimis dan hati-hari, seperti pernyataan Malone yang

menyebutkan bahwa kedua negara sejauh ini berhasil menghindari konflik besar. Sebagian besar ahli justru melihat hubungan ini dengan pesimis, seperti pandangan Malik yang menilai hubungan mereka banyak diwarnai dengan persaingan, serta setiap pihak akan cenderung bersifat defensif ketika terjadi dilemma keamanan. Pandangan lainnya adalah multidimensional, artikel ini mengutip pendapat dari Paul T.V yang menyatakan bahwa konflik Sino-India tidak hanya sebatas sengketa perbatasan tetapi juga melibatkan aspek-aspek lain, sehingga membutuhkan solusi untuk setiap aspeknya, namun solusi tersebut akan sulit dicapai dalam waktu singkat.<sup>17</sup>

Artikel ini juga menguraikan isu-isu yang terjadi antara Tiongkok dan India secara spesifik, yang pertama ialah sengketa perbatasan, isu ini merupakan salah satu masalah terbesar yang mendasari bentrokan antara keduanya. Pada tahun 1949, yaitu di wilayah Aksai Chin di Himalaya Barat yang diduduki oleh Tiongkok namun diklaim oleh India, dan wilayah Arunachal Pradesh di Himalaya Timur yang diklaim oleh Tiongkok. Isu persaingan status yang juga mewarnai konflik ini, terlihat pada upaya kedua pihak dalam membangkitkan status historis mereka sebagai kekuatan besar di masa lalu sebelum era penjajahan Eropa, trauma kolonial membuat Sino-India lebih sensitif terhadap rasa penghinaan. Penulis artikel ini juga menyebutkan bahwa konflik ini meliputi isu geostrategis. Pada persaingan ini kedua negara baik Tiongkok maupun India sama-sama memperkuat posisinya dengan membentuk aliansi dengan musuh masing-masing yaitu Tiongkok-Pakistan dan India-AS.

---

<sup>17</sup> Alan Bloomfield, "The India–China Bilateral Relationship: A 'Serious and Enduring Rivalry,'" *Journal of the Indian Ocean Region* 17, no. 1 (23 March, 2021): 1–19.

Analisis yang disajikan dalam artikel ini memberikan pemahaman dasar kepada peneliti tentang rivalitas Sino-India berupa sejarah dan awal mula konflik yang terjadi, serta bagaimana konflik tersebut meluas pada aspek-aspek lain seperti persaingan ekonomi, dan persaingan status dan menjadi sebuah rivalitas yang multidimensional. Adapun peneliti akan memanfaatkan informasi dari artikel ini untuk mendukung penelitian yang lebih spesifik untuk memahami bagaimana rivalitas ini berdampak pada negara-negara lain di kawasan Asia Selatan terkhususnya Nepal.

Tinjauan pustaka yang kedua yaitu berjudul *China and India: Awkward Ascents* yang ditulis oleh Shashank Joshi. Artikel ini menjelaskan bagaimana hubungan Tiongkok dan India hingga terbentuknya konflik berkepanjangan ini, kedua negara ini mulai berbatasan langsung sejak tahun 1950 ketika Tiongkok telah berhasil mencaplok wilayah Tibet, dan sejak saat itu muncullah sengketa baru terkait perbatasan wilayah antara India dengan Tiongkok. Di wilayah Timur India berpendapat bahwa garis McMahon yang sebelumnya merupakan batasnya dengan Tibet tetap menjadi batasnya dengan Tiongkok setelah Tibet dicaplok, sedangkan di wilayah Barat, India mengklaim daerah gurun, Aksai Chin namun tidak pernah menguasainya.

Selama tahun 1950 dijelaskan bahwa India masih bersikap pasif dan menghindari pembahasan terkait perbatasan. Kemudian konflik mulai meningkat pada tahun 1959, ketika terjadi pemberontakan Tibet dan kaburnya Dalai Lama ke India melalui garis McMahon, hal ini kemudian memunculkan kecurigaan Tiongkok bahwa India bersekutu dengan Tibet dan AS untuk menekan posisi Tiongkok. Terjadi konflik militer kecil pada kasus ini yang membuat India merasa

kehormatannya telah terganggu. Tiongkok kemudian memperkeras sikapnya terhadap sengketa perbatasan. Hal ini kemudian menimbulkan *security dilemma* karena adanya ketidakpastian niat dari pihak-pihak yang terlibat.

Artikel ini memberikan pemahaman bahwa konflik perbatasan dan perilaku Tiongkok dan India juga dipengaruhi oleh situasi di Tibet. Merujuk pada topik yang akan diteliti, artikel ini membantu peneliti untuk melihat bagaimana peningkatan ketegangan hubungan Sino-India dan dapat mendukung analisis penelitian terkait upaya Tiongkok dan India untuk saling menyaingi satu sama lain. Peneliti dapat menggunakan artikel ini sebagai acuan untuk melihat bagaimana Tiongkok bertindak dalam mencapai kepentingannya yang berkaitan dengan persaingan dengan India.

Tinjauan pustaka yang ketiga yaitu berjudul *Geo-political Rivalry of Global Powers in Nepal: An Impact Analysis* yang ditulis oleh Prakash Bista. Artikel ini berisi penjelasan mengenai bagaimana persaingan Tiongkok dan India telah mempengaruhi kebijakan Nepal, serta bagaimana Nepal menyikapi situasi ini. Penulis mengatakan bahwa kebijakan luar negeri juga dipengaruhi oleh faktor geografi, terutama bagi negara yang berukuran kecil seperti Nepal.<sup>18</sup> Karena memiliki kerentanan yang berbeda dengan negara-negara besar, maka negara kecil akan memiliki strategi dan prioritas yang berbeda dalam kebijakan luar negerinya. Himalaya telah lama menjadi pelindung bagi Nepal sebelumnya, Himalaya yang merupakan rute aktivitas ekonomi menjadikannya cukup rentan akan isu geopolitik dan keamanan. Hal ini membuat Nepal menjadi tempat dari kedua kekuatan besar

---

<sup>18</sup> Prakash Bista, "Geo-Political Rivalry of Global Powers in Nepal: An Impact Analysis," *Unity Journal* 4, no. 01 (15 Februari, 2023): 1–16.

menaruh pengaruhnya, karena Nepal memiliki potensi untuk memberikan peluang dalam persaingan Sino-India, serta menarik Nepal ke dalam hubungan trilateral.

Artikel ini juga menjelaskan dari sudut pandang Nepal terkait isu eksternal yang mengancam stabilitas politik domestiknya. Nepal memiliki kekhawatiran akan intervensi asing yang mencoba mengganggu urusan internal Nepal, dan memiliki kecurigaan bahwa hal tersebut merupakan upaya untuk menjatuhkan posisi PM Nepal saat itu. Hal itu juga diperparah dengan adanya sengketa wilayah antara Nepal dengan India di Lipulekh-Kalapani, dan adanya opini publik Nepal yang menilai keterlibatan Tiongkok pada politik di Nepal semakin meningkat, yang dapat menciptakan intervensi luar pada politik internal Nepal.

Artikel ini memberikan pemahaman kepada peneliti terkait bagaimana persaingan antara Tiongkok dan India telah berdampak pada Nepal sebagai negara kecil yang terletak di antara dua kekuatan ini. Artikel ini memaparkan analisis bagaimana Nepal menjadi relevan dalam hubungan Tiongkok dan India dengan menyoroti sudut pandang Nepal sebagai negara yang dapat memberikan pengaruh pada dinamika persaingan Tiongkok dan India. Peneliti dapat menggunakan artikel ini sebagai acuan untuk memperdalam analisis terkait kepentingan Tiongkok di Nepal dalam upayanya dalam menghadapi India.

Tinjauan pustaka yang keempat yaitu berjudul *Caught in The India-China Rivalry: Policy Options for Nepal* yang ditulis oleh Pramod Jaiswal. Artikel ini menjelaskan bagaimana peran yang dimiliki Tibet dalam persaingan Sino-India. Tibet merupakan wilayah yang penting dalam strategi kebijakan Tiongkok di Asia Selatan. Sehingga masalah terkait Tibet menjadi ancaman bagi Tiongkok dan dapat

memengaruhi kebijakannya terhadap Nepal, seperti pemberontak Khampa dari Tibet yang pernah menggunakan wilayah Nepal di tahun 1959.

Nepal sendiri merupakan negara yang berdaulat, namun secara Historis selalu menjadi bagian dari sistem keamanan India. Sebelum Tibet dicaplok oleh Tiongkok, Nepal memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Tibet daripada dengan Tiongkok. Setelah Tibet menjadi bagian dari kedaulatan Tiongkok, Nepal mulai menjalin hubungan diplomatik formal dengan Tiongkok. Hubungan keduanya didominasi oleh aspek ekonomi. Artikel ini mengulas sedikit tentang bagaimana persaingan Sino-India di Nepal dengan membandingkan bantuan yang diberikan kepada Nepal. Tiongkok fokus pada tujuan untuk menjaga keamanan perbatasan, sedangkan India memiliki tujuan yang lebih kompleks dan kurang terkoordinasi.

Artikel ini memberikan analisis yang cukup komprehensif terkait awal mula kedekatan hubungan Tiongkok dengan Nepal. Peneliti dapat menggunakan artikel ini sebagai acuan untuk memahami upaya-upaya awal yang dilakukan Tiongkok dalam meningkatkan hubungannya dengan Nepal, namun artikel ini hanya terbatas hingga tahun 2013, sehingga memberikan peluang bagi peneliti untuk melihat lebih lanjut perkembangan persaingan Tiongkok dan India di Nepal.

Tinjauan pustaka yang kelima berjudul *China's 'regionalism foreign policy' and China-India relations in South Asia* yang ditulis oleh Carla P. Freeman. Artikel ini memberikan penjelasan mengenai BRI Tiongkok sebagai landasan kebijakan luar negeri regionalisme, sebagai bagian dari strategi geopolitiknya yang lebih luas di Asia Selatan. BRI dibingkai dalam pendekatan keamanan yang komprehensif,

dimana Tiongkok berusaha untuk mengintegrasikan pembangunan ekonomi dengan stabilitas regional, serta kemakmuran dan keamanan.

Melalui investasi dalam proyek-proyek infrastruktur dan perdagangan, Tiongkok bertujuan untuk menciptakan lingkungan regional yang kooperatif yang sejalan dengan kepentingan nasionalnya. Hal ini termasuk membina hubungan melalui pengelompokan regional seperti Shanghai Cooperation Organization dan inisiatif seperti Koridor Ekonomi China-Pakistan. Upaya-upaya ini dirancang tidak hanya untuk meningkatkan akses Tiongkok ke pasar tetapi juga untuk mengimbangi dominasi tradisional India di Asia Selatan.<sup>19</sup>

Dinamika persaingan antara Tiongkok dan India memperumit politik regional, mempengaruhi negara-negara Asia Selatan yang lebih kecil. Meskipun BRI menawarkan peluang bagi negara-negara ini untuk berkembang, mereka juga berisiko menjadi medan pertempuran bagi persaingan Sino-India. Artikel ini menekankan bahwa meskipun strategi regionalisme Tiongkok dapat mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, pendekatannya saat ini memperburuk ketegangan dengan India, yang memandang BRI sebagai sarana untuk merongrong pengaruh regionalnya.

Artikel ini memberikan pemahaman yang cukup detail terkait instrumen kebijakan Tiongkok yang sangat populer yaitu BRI. Melalui artikel ini, peneliti memahami bagaimana Tiongkok menggunakan instrumen ekonomi dalam persaingannya dengan India. Artikel ini juga menjelaskan bagaimana BRI memberikan kemungkinan resiko buruk bagi negara-negara kecil di Asia Selatan dan bagi Tiongkok sendiri. Sehingga hal ini memberikan peluang bagi peneliti

---

<sup>19</sup> Carla P. Freeman, "China's 'Regionalism Foreign Policy' and China-India Relations in South Asia," *Contemporary Politics* 24, no. 1 (19 Desember, 2017): 81–97.

untuk menganalisis lebih lanjut bagaimana strategi Tiongkok dalam memaksimalkan strateginya dalam persaingan dengan India dan mencegah resiko yang tidak diharapkan.

### 1.7 Kerangka Konseptual

Dalam hubungan internasional, negara-negara mengejar kepentingan nasionalnya dengan memanfaatkan berbagai bentuk kekuatan. Geopolitik telah lama menjadi bagian dari strategi pemanfaatan kekuatan negara untuk mencapai kepentingan tersebut. Konsep geopolitik muncul dari teori realisme, yang memandang kekuatan negara sebagai kombinasi berbagai sumber daya termasuk geografi, ekonomi, dan teknologi.<sup>20</sup> Geopolitik, sebagai bagian dari kekuatan ini, menyoroti penggunaan geografi secara strategis, yang umumnya dilakukan dengan cara militer dan logika konfrontasi.<sup>21</sup>

Setelah Perang Dingin, kekuatan militer semakin kehilangan relevansinya dalam urusan global, dan metode militer mulai digantikan oleh metode ekonomi. Seiring berjalannya waktu, geoekonomi muncul sebagai perluasan dari konsep geopolitik, yang berfokus pada instrumen ekonomi untuk mencapai tujuan strategis. Dalam artikel yang berjudul “*International Economics and International Relations: A Case of Mutual Neglect*” Susan Strange memberikan pandangannya terkait adanya kekosongan konseptual dalam studi hubungan ekonomi internasional, khususnya tentang bagaimana fenomena ekonomi digunakan sebagai alat kekuasaan politik.

---

<sup>20</sup> Joshua S Goldstein and Jon C Pevehouse, *International Relations* (Pearson Higher Ed, 2012)

<sup>21</sup> Mikael Wigell and Antto Vihma, “Geopolitics versus Geoeconomics: The Case of Russia’s Geostrategy and Its Effects on the EU,” *International Affairs* 92, no. 3 (May 2016): 605–627.)

*“What is noticeably missing... are more general studies of international economic relations... treated analytically, with the political analysis predominating over the economic analysis.”<sup>22</sup>*

Kritik ini menjadi dasar bagi perkembangan geoekonomi sebagai bidang yang mengkaji bagaimana negara menggunakan alat ekonomi untuk mengejar tujuan strategis dan geopolitik. Geoekonomi menjadi dimensi penting dalam strategi internasional, yang menunjukkan bahwa alat ekonomi sangat penting dalam pertimbangan kebijakan negara. Sehingga pada penelitian ini, peneliti menggunakan konsep geoekonomi untuk menganalisis strategi Tiongkok.

### **1.7.1 Geoekonomi**

Istilah geoekonomi digunakan karena menggabungkan alat ekonomi dengan tujuan geopolitik dan pertimbangan geografis. Kata "ekonomi" merujuk pada instrumen seperti perdagangan, investasi, dan sanksi yang digunakan untuk mencapai kepentingan strategis negara. Kata "geo" menandakan bahwa instrumen tersebut diarahkan untuk mempengaruhi wilayah atau tatanan politik tertentu secara strategis. Dengan demikian, geoekonomi menggambarkan cara negara menggunakan kekuatan ekonomi untuk mencapai dominasi atau pengaruh dalam konteks persaingan global yang bersifat geografis.<sup>23</sup>

Definisi ini berusaha untuk menekankan geoekonomi sebagai fenomena yang berbeda namun juga memiliki keterkaitan dan

---

<sup>22</sup> Susan Strange, “International Economics and International Relations: A Case of Mutual Neglect,” *International Affairs* 46, no. 2 (April 1970): 304–315.

<sup>23</sup> Sören Scholvin And Mikael Wigell, *Surveying The State Of The Art 102 Geo-Economics As Concept And Practice In International Relations*, 2018.

ketergantungan terhadap geopolitik, yang mengakui geoekonomi sebagai salah satu alatnya.<sup>24</sup> Dalam buku yang ditulis oleh Robert D. Blackwill & Jennifer Harris "*War by Other Means: Geoeconomics and Statecraft*", dijelaskan bahwa kebijakan geoekonomi dapat memiliki tujuan ganda. Dijelaskan bahwa geoekonomi merupakan penggunaan instrumen ekonomi untuk mempromosikan dan mempertahankan kepentingan nasional, menghasilkan hasil geopolitik yang menguntungkan, serta dampak tindakan ekonomi suatu negara terhadap tujuan geopolitik negara lain.<sup>25</sup> Namun dalam bukunya, Blackwill dan Harris membatasi fokusnya hanya pada penggunaan kebijakan geoekonomi untuk menghasilkan hasil geopolitik yang menguntungkan.

Upaya negara dalam memproyeksikan kekuasaan secara geoekonomi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Blackwill dan Harris menjelaskan bahwa tidak semua negara setara dalam kemampuan mereka memproyeksikan kekuatan geopolitik, terdapat *endowment* geoekonomi atau kemampuan dasar, dan atribut yang menentukan seberapa efektif suatu negara dalam memanfaatkan alat-alat geoekonomi.<sup>26</sup>

1. Endowment pertama adalah kemampuan suatu negara untuk mengarahkan dan mengendalikan investasi keluar. Kontrol semacam ini lebih efektif dilakukan melalui dana kekayaan negara, perusahaan dan bank milik negara, daripada melalui perjanjian perdagangan bebas dan

---

<sup>24</sup> Volodymyr Lipkan, Oksana Kuznichenko, dan Andrii Ivanov, "Geoeconomics as A Tool of Modern Geostrategy," *Baltic Journal of Economic Studies* 9, no. 1 (31 Maret, 2023): 113–123.

<sup>25</sup> Robert D Blackwill dan Jennifer M Harris, *War by Other Means: Geoeconomics and Statecraft* (Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, 2016).

<sup>26</sup> Robert D Blackwill dan Jennifer M Harris

perjanjian investasi bilateral. Negara memiliki kemampuan mengontrol investasi keluar negeri lembaga/instrumen negara (misalnya bank pemerintah, perusahaan milik negara, dana kekayaan negara yang bisa mengarahkan investasi sesuai kepentingan politik.

2. Endowment kedua terletak pada karakteristik pasar domestik suatu negara, ukuran, prospek pertumbuhan, keterbukaan terhadap impor dan persaingan asing yang dapat digunakan baik secara koersif maupun bersahabat untuk mendukung tujuan kebijakan luar negeri. Negara dengan pasar yang besar memberi daya tawar karena negara lain ingin mengakses konsumennya dan dapat menciptakan asimetri hubungan ekonomi.
3. Endowment ketiga adalah kemampuan suatu negara untuk mempengaruhi arus komoditas dan energi, baik sebagai produsen atau konsumen utama maupun sebagai titik transit yang penting. Yang dibuktikan dengan kemampuan monopoli, monosponi, dan menguasai jalur distribusi, seperti Terusan Suez atau Selat Hormuz
4. Endowment keempat adalah sentralitas suatu negara, atau posisi yang relatif tinggi dalam sistem keuangan global, yang ditandai dengan kepemilikan mata uang cadangan yang banyak digunakan dalam transaksi internasional, dan kesehatan ekonomi suatu negara

Perangkat-perangkat ini dapat membentuk potensi geoekonomi suatu negara. Memahami dan mengetahui keunggulan struktural yang dimiliki negara akan dapat mempermudah negara dalam memilih alat-alat geoekonomi yang tepat untuk menghadapi negara target dan untuk

mencapai kepentingannya. Selanjutnya Blackwill dan Harris mengidentifikasi tujuh alat geoekonomi dan merinci bagaimana alat-alat ini dapat digunakan oleh negara sebagai berikut.<sup>27</sup>

### 1. *Trade Policy*

Kebijakan perdagangan geoekonomi beroperasi sebagai alat strategis bagi negara-negara untuk mencapai tujuan politik dan ekonomi, yang sering dilakukan melalui bujukan positif atau tindakan koersif. Bujukan positif melibatkan penggunaan insentif perdagangan untuk mendorong perilaku atau aliansi yang diinginkan. Blackwill dan Harris menggunakan Zona Industri yang Memenuhi Syarat *Qualifying Industrial Zones* (QIZ) di Yordania dan Mesir sebagai contoh. Zona industri ini didirikan sebagai bagian dari perjanjian damai *Camp David*, yang bertujuan untuk memberikan insentif kepada Yordania atas dukungannya terhadap perjanjian tersebut melalui manfaat ekonomi. Perdagangan juga dapat digunakan secara paksa untuk menekan atau menghukum negara. Contohnya Rusia yang telah sering menggunakan embargo perdagangan sebagai pengaruh politik.

Adapun indikator kebijakan ini sebagai alat geoekonomi sebagai berikut:

1. Dapat berupa insentif positif: Ditunjukkan melalui tindakan yang dirancang untuk menarik dukungan atau keberpihakan kepada negara pelaku
2. Insentif koersif: termasuk embargo atau kenaikan tarif, ditujukan untuk memberi hukuman atau peringatan terhadap negara target

---

<sup>27</sup> Robert D Blackwill dan Jennifer M Harris

3. Adanya dampak perubahan terhadap harga dan permintaan
4. Kebijakan biasanya bersifat mengantisipasi terhadap perubahan perilaku negara target

## **2. Investment Policy**

Kebijakan investasi geoekonomi telah menjadi alat penting bagi negara-negara untuk memberikan pengaruh dan mencapai tujuan strategis dalam ekonomi global. Interaksi lintas batas modern semakin didominasi oleh investasi keuangan, termasuk investasi portofolio jangka pendek dan investasi langsung jangka panjang. Pergeseran ini telah memperkuat signifikansi geopolitik dari investasi, dimana negara-negara kini mengendalikan bagian yang lebih besar dari aliran ini melalui badan usaha milik negara, atau *sovereign wealth fund* (SWF), dan bank-bank yang didukung negara.

Adapun indikator keberhasilan alat geoekonomi ini sebagai berikut:

1. Berdampak pada perubahan arus keuangan
2. Memanfaatkan peran badan usaha milik negara (SWF) atau dikendalikan langsung oleh negara
3. Dilakukan dengan tujuan geopolitik eksplisit atau syarat politik tertentu
4. Berdampak pada terbentuknya ketergantungan ekonomi asimetris antara penerima dan investor

## **3. Economic Sanctions**

Sanksi ekonomi berfungsi sebagai alat geoekonomi dengan memanfaatkan ukuran ekonomi, dominasi pasar, atau kontrol suatu negara

terhadap sistem global yang penting untuk menekan atau menghukum negara target. Efektivitas sanksi biasanya bergantung pada ukuran pasar domestik negara yang dijatuhi sanksi dan pangsa perdagangan global atau sistem keuangannya. Seperti dominasi dolar AS dalam keuangan global memungkinkan Departemen Keuangan AS untuk memaksa bank-bank internasional untuk memilih antara mengakses sistem dolar atau berbisnis dengan entitas yang terkena sanksi, contohnya kasus Iran.

Namun, keberhasilan sanksi dalam mencapai tujuan geopolitik masih beragam dan bergantung pada beberapa faktor. Sanksi-sanksi ini juga membutuhkan kerja sama internasional yang luas untuk menghindari celah. Selain itu, sanksi dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak diharapkan, seperti mempercepat upaya negara yang terkena sanksi untuk mengurangi ketergantungan pada sistem negara pemberi sanksi. Dan adapun indikator dari alat ini adalah:

1. Bersifat koersif untuk menghukum negara yang tidak patuh atau negara yang tidak bertindak sesuai keinginan negara pelaku.
2. Digunakan untuk menciptakan kepatuhan
3. Merupakan opsi setelah kegagalan perundingan diplomatis

#### **4. Cyber**

Operasi siber juga muncul sebagai alat geoekonomi yang kuat, yang memungkinkan negara untuk memberikan pengaruh untuk mencapai tujuan geopolitik. Untuk memenuhi syarat sebagai geoekonomi, serangan siber harus disponsori oleh negara dan ditujukan untuk menambah biaya ekonomi atau mengganggu infrastruktur penting, seperti sistem perbankan, atau

perusahaan besar, untuk melemahkan ekonomi negara target dan meningkatkan kerentanannya. Keberhasilan serangan siber sebagai alat geoekonomi ditentukan oleh kemampuan negara untuk memengaruhi kebijakan target dengan tidak teridentifikasi, dan meliputi indikator berikut:

1. Dilakukan langsung atau disponsori oleh negara
2. Dilakukan dengan niat ekonomi dan menasar pada infrastruktur ekonomi negara target
3. Dapat mempengaruhi keamanan nasional negara target

#### **5. *Economic Assistance***

Bantuan ekonomi, termasuk bantuan militer, bantuan pembangunan, dan bantuan kemanusiaan, juga berfungsi sebagai alat geoekonomi yang memungkinkan negara untuk membeli pengaruh strategis dan mencapai tujuan geopolitik. Contohnya paket bantuan militer Arab Saudi senilai \$3 miliar untuk Lebanon pada tahun 2013 dirancang tidak hanya untuk melawan Hizbullah, namun juga untuk mengirimkan pesan kepada AS tentang ketidakpuasan Saudi akan kebijakan AS di Suriah dan Iran. Hal ini menunjukkan bagaimana bantuan militer dapat digunakan untuk memperkuat aliansi geopolitik dan menghalangi pembelotan ke blok saingan. Keberhasilan alat ini ditunjukkan oleh kemampuan donor untuk membentuk kebijakan luar negeri dan penyelarasan strategis penerima bantuan. Adapun indikator kebijakan ini sebagai alat geoekonomi sebagai berikut:

1. Dapat berbentuk semua jenis bantuan (militer, pembangunan, kemanusiaan) dan dianggap geoekonomi karena dapat dialihkan manfaatnya oleh pemerintah.
2. Dianggap geopolitik apabila memuat tujuan geopolitik atau kepentingan negara pendonor. Seperti seperti larangan kerja sama dengan rival
3. Bantuan bisa digunakan bersamaan dengan sanksi untuk menghukum kebijakan luar negeri negara pihak ketiga

#### **6. *Financial and Monetary Policy***

Kebijakan keuangan dan moneter juga berfungsi sebagai alat geoekonomi yang kuat. Kebijakan ini memungkinkan negara untuk memproyeksikan pengaruh dan mencapai tujuan strategis melalui pengelolaan modal, mata uang, dan biaya pinjaman. Jejak global mata uang suatu negara juga dapat secara signifikan meningkatkan pengaruh geopolitiknya. Contohnya adalah mata uang Euro yang dirancang tidak hanya untuk mengintegrasikan ekonomi Eropa namun juga untuk memperkuat pengaruh geopolitik Uni Eropa. Contoh lainnya adalah dominasi dolar AS yang memberikan AS keuntungan lebih, seperti kemampuan untuk menjalankan defisit yang besar, menjatuhkan sanksi keuangan, dan bertindak sebagai tempat berlindung yang aman selama krisis global.

Pemanfaatann alat ini juga dapat dilihat dari kemampuan negara untuk menjaga stabilitas mata uang dan mengendalikan inflasi. Kemampuan suatu negara untuk bertahan dari tekanan ekonomi eksternal, seperti sanksi

atau krisis keuangan global, juga bisa mendukung keberhasilan geoekonomi. Berikut adalah indikator-indikator dari alat ini:

1. Menciptakan jejak mata uang global, dimana semakin luas penggunaan mata uang suatu negara, semakin besar pengaruh geopolitiknya
2. Terjadinya pergeseran penggunaan mata uang, seperti peralihan dari penggunaan USD ke mata uang negara masing-masing.

#### ***7. National Policies Governing Energy and Commodities***

Kebijakan nasional yang mengatur energi dan komoditas memainkan peran penting dalam strategi geoekonomi. Seperti yang terlihat pada penggunaan sumber daya energi oleh Rusia untuk memberikan pengaruh. Sejak keruntuhan Uni Soviet, Rusia telah berulang kali menggunakan gangguan pasokan gas sebagai alat geopolitiknya, terutama dalam perselisihan dengan Eropa. Tiongkok juga menggunakan energi sebagai aset strategis, dengan membatasi ekspor elemen tanah jarang dan memperluas kontrolnya atas sumber daya minyak lepas pantai untuk menegaskan kepentingan geopolitiknya. Sumber daya energi juga dapat berfungsi sebagai instrumen keamanan ekonomi daripada pemaksaan.

Adapun indikatornya sebagai alat geoekonomi yaitu:

1. Dimanfaatkan untuk mengamankan sumber energi atau kontrol atas distribusi energi
2. Kebijakan energi sebagai jaminan politik, seperti mengurangi ketergantungan pada negara rival atau menambah ketergantungan pada negara pelaku

3. Diikuti dengan investasi untuk pembangunan dan pemanfaatan energi

## 1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian dalam ilmu hubungan internasional merupakan suatu prosedur sistematis yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan analisis dalam sebuah penelitian yang meliputi cara-cara mendeskripsikan, menjelaskan, dan meramalkan fenomena sosial guna memperoleh pengetahuan yang terstruktur terkait suatu fenomena dalam hubungan internasional.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian adalah metode kualitatif. Metode kualitatif bertujuan untuk memahami dan mengeksplorasi makna terhadap suatu fenomena sosial atau manusia yang dihasilkan dari pemikiran individu atau kelompok.<sup>29</sup> Sedangkan jenis penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran, penjelasan dan jawaban atas persoalan-persoalan tentang fenomena yang diteliti.<sup>30</sup> Peneliti menggunakan pendekatan dan jenis penelitian yang disebutkan untuk menganalisis strategi persaingan Tiongkok terhadap India di Nepal.

---

<sup>28</sup> Mohtar Mas'oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin Dan Metodologi* (Jakarta: Lp3es, 1990), 2–3.

<sup>29</sup> John W Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 3rd ed. (New Delhi: Sage, 2009).

<sup>30</sup> Muhammad Arsyam and M. Yusuf Tahir, "Ragam Jenis Penelitian dan Perspektif,"

### 1.8.2 Batasan Penelitian

Studi ini berfokus pada periode 2020–2024 untuk menyoroti peristiwa penting yang memengaruhi persaingan Tiongkok-India di Nepal. Ketegangan Nepal-India akibat peta baru Nepal pada 2020, bentrokan perbatasan Sino-India di Lembah Galwan pada tahun yang sama, peningkatan keterlibatan Tiongkok melalui BRI di Asia Selatan, serta dinamika politik Nepal pasca pemilu 2022 yang memengaruhi strategi kedua negara, dan menganalisis perkembangan hubungan-hubungan ini hingga 2024.

### 1.8.3 Unit dan Level Analisis

Berdasarkan buku *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi* yang ditulis Mochtar Masoed, konsep unit analisis dan unit penjelasan merupakan landasan penting dalam penelitian Hubungan Internasional. Unit analisis merupakan objek yang diteliti dalam suatu penelitian atau disebut juga dengan variabel dependen. Objek-objek tersebut dapat merujuk pada negara dan juga aktor lain seperti organisasi internasional, perusahaan multinasional (MNC), dan juga individu. Dalam penelitian ini, objek yang menjadi unit analisis adalah negara Tiongkok. Unit eksplanasi adalah variabel yang digunakan untuk menjelaskan perilaku unit analisis atau variabel yang mempengaruhi perilaku unit analisis, atau disebut juga dengan variabel independen. Unit eksplanasi dalam penelitian ini adalah Nepal.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Mohtar Mas'oe'd, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin Dan Metodologi* (Jakarta: Lp3es, 1990).

Unit eksplanasi juga sering terkait dengan tingkat/level analisis, misalnya jika negara adalah unit analisis, perilakunya akan dijelaskan berdasarkan unit eksplanasinya, seperti dari tingkat individu (seperti kepribadian pemimpin), tingkat domestik (seperti jenis rezim), atau tingkat sistem internasional (seperti distribusi kekuatan atau norma global).<sup>32</sup> Kenneth Waltz mengidentifikasi tiga tingkatan analisis, yaitu tingkatan individu, tingkat negara, dan tingkat sistemik atau internasional.<sup>33</sup> Berdasarkan unit eksplanasi yang dipilih untuk menjelaskan perilaku unit analisis, maka level analisis dari penelitian ini berada pada tingkat internasional.

#### 1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan metode library research atau studi kepustakaan dengan sumber utama menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang didapatkan secara tidak langsung dari objek penelitian.<sup>34</sup> Data yang relevan dan credible dengan topik penelitian dipilih dan dikumpulkan untuk memperoleh informasi yang dapat mendukung analisis penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder meliputi buku-buku akademik, artikel jurnal, aporan resmi, dan artikel berita yang terpercaya yang dapat dipertanggungjawabkan.

Peneliti memilih data dengan kriteria-kriteria tertentu agar hasil analisis sesuai dengan kebutuhan penelitian yaitu meliputi hal-hal berikut,

---

<sup>32</sup> Mohtar Mas'ood

<sup>33</sup> Waltz, Kenneth N. *Man, the State, and War: A Theoretical Analysis*. New York: Columbia University Press, 1959.

<sup>34</sup> Annisa Rizky Fadilla dan Putri Ayu Wulandari, "Literature Review Analisis Data Kualitatif: Tahap Pengumpulan Data," *Mitita Jurnal Penelitian* 1, no. 3 (Agustus 2023): 34–46.

pertama ialah merupakan karya ilmiah yang diterbitkan dari publikasi yang credible, seperti artikel jurnal yang diterbitkan dari web publikasi *Taylor & Francis Online* dan *ScienceDirect*, selain itu data juga diambil dari sumber berita internasional yang bereputasi seperti *BBC News* dan *The Diplomat*. Kedua adalah sumber yang diterbitkan merupakan publikasi antara tahun 2020 hingga tahun 2024 untuk mendapatkan data yang masih relevan di masa kini. Ketiga adalah sumber berita resmi milik pemerintah yang bersifat transparan dan dapat diakses publik, seperti *Embassy of Nepal, Beijing, Embassy of the People's Republic of China in the Federal Democratic Republic of Nepal*; dan *Ministry of Foreign Affairs of China*.

#### **1.8.5 Teknik Analisis Data**

Data yang dikumpulkan dalam studi ini dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif John W. Creswell, yang melibatkan tiga tahap utama, yaitu mengorganisir dan mempersiapkan data, membaca seluruh informasi untuk mendapatkan pemahaman umum, dan melakukan analisis mendalam melalui proses koding.<sup>35</sup> Penelitian ini bergantung pada penelitian perpustakaan dan data sekunder, sehingga analisis dilakukan dengan mengolah data yang sudah ada, seperti literatur akademik, artikel jurnal, laporan resmi pemerintah, dan sumber berita internasional yang kredibel.

Tahap pertama dimulai dengan mengorganisir dan mempersiapkan data untuk analisis. Peneliti mengumpulkan semua dokumen relevan, seperti artikel akademik dari *Taylor & Francis Online* dan *ScienceDirect*,

---

<sup>35</sup> John W Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 3rd ed. (New Delhi: Sage, 2009).

laporan berita dari BBC News dan The Diplomat, serta catatan resmi dari lembaga seperti Kedutaan Besar Nepal di Beijing dan Kementerian Luar Negeri Tiongkok. Semua data kemudian diurutkan berdasarkan konten dan jenis sumbernya untuk dapat menjelaskan hubungan unit analisis dan unit eksplanasi yaitu Tiongkok dan Nepal.

Setelah tahap pengorganisasian, langkah berikutnya melibatkan pembacaan dan screening terhadap semua dokumen untuk memahami informasi dan konteksnya agar sesuai dengan kebutuhan dari setiap aspek pada penelitian seperti unit analisis, unit eksplanasi, dan analisis penelitian. Peneliti membaca data untuk mengidentifikasi tujuan dari setiap sumber, kedalaman analisis, dan pola berulang yang mungkin muncul. Pada bagian ini, peneliti melakukan penyaringan informasi dengan mencatat informasi dan data-data penting yang relevan untuk menjelaskan topik penelitian agar dapat dilanjutkan pada tahap analisis

Tahap selanjutnya adalah analisis yang dilakukan melalui koding. Di tahap ini, peneliti menganalisis data dengan mengelompokkan informasi penting ke dalam tema-tema utama, yang disesuaikan dengan konsep yang digunakan untuk menganalisis topik penelitian yaitu konsep Geoekonomi. Peneliti mengelompokkan informasi penting ke dalam tema-tema utama yang meliputi alat-alat geoekonomi yang dioperasionalkan Tiongkok di Nepal. Proses ini membantu peneliti untuk mengidentifikasi pola dan hubungan dalam data. Hasil dari rangkaian tahap analisis data ini kemudian digunakan untuk menjawab pertanyaan.

## **1.9 Sistematika Penelitian**

### **Bab I Pendahuluan**

Peneliti menjelaskan latar belakang yang berisikan gambaran umum terkait topik yang dibahas, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka konseptual, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

### **Bab II Kebijakan Ekonomi Strategis Tiongkok**

Pada bab ini membahas mengenai kebijakan ekonomi Tiongkok di Asia Selatan. Peneliti menjelaskan bagaimana kebijakan ini memberikan pengaruh terhadap hubungan Tiongkok dengan negara-negara di kawasan.

### **Bab III Nepal dan Dinamika Geopolitik Asia Selatan**

Pada bab ini membahas mengenai bagaimana posisi strategis Nepal, serta bagaimana dinamika geopolitik Asia Selatan memengaruhi posisi Nepal terhadap kepentingan Tiongkok.

### **Bab IV Strategi Geoekonomi Tiongkok di Nepal**

Pada bab ini membahas bagaimana strategi geoekonomi yang diterapkan Tiongkok di Nepal sebagai upaya untuk memperkuat posisinya tidak hanya sebagai mitra bilateral Nepal tetapi juga di Asia Selatan secara lebih luas.

### **Bab V Penutup**

Bagian ini berisi kesimpulan dan saran terhadap penelitian.